

# KOMUNIKASI PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DAN ISU LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ETIS PEMBANGUNAN

Muhamad Irfan<sup>1)</sup>, Mite Setiansah<sup>2)</sup>, Nana Sutikna<sup>3)</sup>

- 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, E-mail: [Irfanmillenial@gmail.com](mailto:Irfanmillenial@gmail.com)
- 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, E-mail: [mite.setiansah@unsoed.ac.id](mailto:mite.setiansah@unsoed.ac.id)
- 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, E-mail: [nana.sutikna@unsoed.ac.id](mailto:nana.sutikna@unsoed.ac.id)

## ARTICLE INFORMATION

### KEYWORDS:

IKN; Pembangunan; Komunikasi

## CORRESPONDENCE

Phone: +62-822-6658-0318

E-mail: [Irfanmillenial@gmail.com](mailto:Irfanmillenial@gmail.com)

## A B S T R A C T

*The government has announced the transfer of the capital city from DKI Jakarta to the Archipelago Capital (IKN) in Kalimantan. The purpose of this research is to analyze development communication carried out by the government towards the development of IKN regarding environmental issues in an ethical perspective of development. Research using qualitative methods with a descriptive approach. The research data used is secondary data from the results of the literature review. Research shows that there is community rejection based on environmental issues due to the government's lack of effective development communication.*

## INTRODUCTION

Sejarah telah mencatat betapa penting dan strategisnya posisi Jakarta dalam pergulatan politik di wilayah Nusantara. Kota yang terletak di wilayah Barat Laut Pulau Jawa tersebut mencatat sejarah panjang, dan telah didaulat dengan posisi sebagai Ibu Kota pada beberapa entitas politik hingga negara Zuhdi et al., (2018) dalam bukunya *Penelusuran Sejarah Peradaban Jakarta* mencatat bahwa Jakarta telah mengalami perubahan nama seiring perkembangan zaman, dimulai dari “Sunda Kelapa” saat masih berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Sunda, menjadi Jayakarta setelah Pangeran Fatahillah dari Demak menaklukkannya pada abad ke-16, dan menjelma menjadi Batavia Ketika VOC hingga koloni Belanda bercongol di sana. Pendudukan Jepang resmi mengembalikan nama Jakarta dan membuang jauh nama Batavia untuk menghilangkan pengaruh Belanda dan merebut hati rakyat. Nama inilah yang kemudian masih begitu melekat di kota ini hingga sekarang. Tidak terhitung betapa banyak peristiwa sejarah bangsa Indonesia yang lahir di kota ini. Peristiwa yang paling dikenang tentu saja Pembacaan Teks Proklamasi yang menandakan kedaulatan

Indonesia dimulai pada 17 Agustus 1945. Setelahnya, sepanjang sejarah, kota ini terus dikenal sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.

Hiruk pikuk urbanisasi di Jakarta sebagai penanda bergeraknya ekonomi Indonesia semakin lama semakin tidak terbendung. Ledakan urbanisasi Jakarta diketahui terjadi secara pesat pada periode awal kemerdekaan hingga Orde Baru berkuasa. Candiworo (2017) mencatat pada periode 1950 jumlah penduduk Jakarta berikisar 1.432.085. Berselang 10 tahun setelahnya, pada 1960, penduduk Jakarta mencapai 2.910.858. Adapun pada data Juni 2022, penduduk Jakarta tercatat mencapai 11,25 juta jiwa dengan kepadatan mencapai 17.013 jiwa/km persegi.

Akibat dari hal ini, perekonomian di Jakarta menjadi meningkat. Pembangunan kota Jakarta mengungguli jauh kota-kota lainnya. Sentralisasi pemerintahan Orde Baru yang berfokus pada pembangunan Pulau Jawa khususnya Jakarta semakin menjadikan kota ini maju melampaui daerah lain di Indonesia. Untuk menunjang hiruk pikuk ibukotanya, Jakarta memiliki kota-kota satelit seperti Depok dan Bekasi. Adapula wilayah metropolitan Jakarta umum disebut

Jabodetabek, merupakan akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Namun demikian, urbanisasi nyatanya membawa pengaruh negatif yang begitu besar, menguras materi bahkan merenggut korban jiwa. Serentetan permasalahan urbanisasi, yang melibatkan fenomena alam hingga sosial. Pada fenomena alam, Jakarta kerap dilanda banjir. Laporan BBC.com pada tahun 2018 mencatat Jakarta sebagai pemegang rekor kota tercepat yang tenggelam. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan yang berlebihan diperparah dengan perubahan iklim global (Hidayati, 2021). Adapula fenomena sosial Jakarta mengalami segudang permasalahan. Pengangguran, kriminalitas tinggi, kemiskinan, dan suburnya Kawasan perumahan hukum mewarnai wajah ibu kota.

Segudang permasalahan tersebut membuat kapabilitas Jakarta sebagai ibu kota dan pusat ekonomi mulai dipertanyakan. Gagasan demi gagasan dalam menuntaskan permasalahan di Jakarta terus bergulir seiring dengan berjalannya waktu, tetapi belum ada yang mampu benar-benar mengubah Jakarta (Ratnaningtyas et al., 2022). Permasalahan di Jakarta juga kerap dijadikan materi muatan budaya populer, seperti lagu karya Benjamin Sueb “Kompur Meleduk”. Pembangunan Jakarta dan sekitarnya yang terlalu pesat kemudian seakan-akan meninggalkan wilayah lain di Indonesia yang masih mengalami kendala keterbatasan infrastruktur dan lainnya. Keberadaan geografis Jakarta yang terlalu menjorok ke arah barat Indonesia juga dianggap menyulitkan wilayah lain di Indonesia yang berada di timur. Pola ini sendiri dapat dilihat dari adanya ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, di mana Indonesia bagian timur selalunya berada di bawah posisi indeks pembangunan Indonesia bagian barat (Hairunnisa & Syaka, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan ini, gagasan pemindahan ibu kota sering dianggap sebagai solusi yang prima, tetapi harus melalui pengorbanan yang begitu besar. Selain itu, menjadi tanda tanya besar mengenai lokasi yang nantinya akan didaulat sebagai Ibu Kota baru Republik Indonesia. Tentu saja ibu kota baru tersebut harus mampu menjadi tuan rumah pemerintahan Republik Indonesia, sebuah negara yang kini tengah mengalami pertumbuhan dan

perkembangan secara pesat (Sari, 2022).

Wacana pemindahan ibu kota terus menjadi kajian yang bergulir. Hingga akhirnya pada 26 Agustus 2019, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan secara resmi mengenai wacana pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Indonesia ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Wacana ini kemudian menimbulkan pro-kontra di ruang publik. Keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan didasari beberapa pertimbangan, seperti minimnya risiko bencana alam, ketersediaan lahan yang luas, infrastruktur yang cukup memadai, dan lokasinya yang berada di tengah Indonesia. Pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat mendorong pemerataan kepadatan penduduk Indonesia dari yang semula terlalu fokus di Pulau Jawa agar dapat menyebar dan merata (Syahadat et al., 2021).

Adapun, Sebagian pihak yang menolak wacana ini berpendapat bahwa pemerintah cenderung “cuci tangan” dengan permasalahan di Jakarta. Alih-alih menyelesaikan dan menyelamatkan terlebih dahulu posisi Jakarta di tengah kesemerawatannya, pemerintah justru mengambil langkah untuk ‘kabur’ ke Kalimantan. Adapun, pemindahan ibu kota ini juga ditanggapi skeptisme bahwa pemerintah justru hanya membawa dan menularkan permasalahan baru di Kalimantan. Adapula pertimbangan isu lingkungan yang bernggapan bahwa Langkah pembukaan kota baru di Kalimantan akan mengancam ekosistem wilayah tersebut. Kota tersebut dinamakan ‘Nusantara’ dan akan mendapatkan akronim IKN yang merujuk pada “Ibu Kota Nusantara”.

Rentetan pro dan kontra yang menjadi isu publik ini tidak terlepas dari kurang efektifnya pemerintah dalam mengonsepan komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk memperbaiki situasi sosial dan ekonomi melalui penggunaan proses dan media komunikasi. Konsep ini banyak dilakukan pada negara berkembang. Narasumber dan diskusi kelompok di lembaga-lembaga resmi adalah contoh bagaimana komunikasi pembangunan dapat terjadi di semua tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga pemerintah nasional dan negara bagian. Hasilnya, inovasi yang dialami masyarakat melalui komunikasi adalah pengembangan

komunikasi pembangunan.

Keberhasilan atau kegagalan sebagian besar program pembangunan sering ditentukan oleh dua variabel penting, yaitu komunikasi dan keterlibatan masyarakat, menurut Colin Fraser dan Sonia Restrepo-Estrada (1998). Terlepas dari kenyataan bahwa komunikasi untuk pembangunan diciptakan pada tahun 1960-an dan sejak itu telah menunjukkan nilai dan pengaruhnya terhadap perubahan dan tindakan pembangunan, fungsinya masih belum sepenuhnya dipahami dan dihargai sampai pada titik di mana hal itu secara teratur diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Banyak prakarsa yang bermaksud baik dikembangkan di lokasi yang sangat jauh dari keadaan sebenarnya di mana prakarsa tersebut dimaksudkan untuk dilaksanakan. Akibatnya, mereka tidak mampu memahami dinamika kekuasaan yang rumit serta praktik-praktik budaya dan komunikasi yang ada di tingkat local (Servaes, 2008).

Komunikasi pembangunan mencakup fungsi-fungsi komunikasi (yang merupakan kegiatan pengubah pesan dua arah), serta partisipasi khalayak dan pemerintah dalam kegiatan pembangunan dari tahap perencanaan melalui pelaksanaan dan evaluasi pendirian. Semua kekuatan dan daya, gagasan, dan kemampuan pendirian-yang dimulai dari pihak yang meluncurkan pendirian dan kemudian dikhususkan untuk masyarakat luas-dijelaskan oleh komunikasi pembangunan. Kegiatan menyiratkan bahwa khalayak sasaran dapat menerima, memahami, dan ikut serta dalam menerapkan konsep yang disajikan (Fajri et al., 2018).

Adapun dalam konteks pemindahan dan pembangunan IKN, pembangunan IKN yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ibu kota negara dan mendorong pemerataan dan pertumbuhan penduduk serta ekonomi yang merata merupakan manifestasi dari teori modernisasi.

Menurut teori modernisasi, semua peradaban-dari masyarakat pertanian, pedesaan, dan tradisional hingga bentuk-bentuk pascaindustri, perkotaan, dan modern-berkembang di sepanjang jalur evolusi tunggal. Dengan kata lain, begitu suatu masyarakat memulai proses modernisasi, ia selalu mengikuti perkembangan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui tahap-tahap pembangunan: ekonomi tradisional, transisi

menuju lepas landas, lepas landas itu sendiri, dorongan menuju kedewasaan, era konsumsi yang tinggi, dan masyarakat pascaindustri. Pendorong internal dan sumber-sumber kemajuan sosio-ekonomi, seperti pendidikan formal, ekonomi berbasis pasar, dan kerangka kerja politik yang demokratis dan sekuler, disorot oleh teori modernisasi. Teori modernisasi kurang memperhatikan pengaruh asing, tetapi tidak sepenuhnya mengecualikan mereka sebagai sumber perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Modernisasi dianggap sebagai 'ladang' permasalahan baru yang menjalar wilayah rural disebabkan ketidak mampuan wilayah urban mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, gelombang penolakan bermunculan menanggapi kontra hal ini. Sejatinya fenomena tersebut dapat diatasi apabila tercipta komunikasi pembangunan yang dilakukan secara efektif dapat meredam adanya isu penolakan masyarakat apabila dalam pelaksanaan komunikasi pembangunannya melakukan tinjauan dari perspektif etis pembangunan.

Belum banyak kajian dan penelitian akademis yang mengkaji fenomena pembangunan IKN dari kacamata etis pembangunan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tinjauan dan kajian lebih lanjut terhadap hal ini. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama, di mana metode pengumpulan data digabung, dan di mana analisis data induktif digunakan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang kejadian dunia nyata yang terjadi di lingkungan yang tidak terkontrol, seperti laboratorium atau pengaturan eksperimental (Sugiyono, 2012).

## METHOD

Data dalam penelitian dihimpun melalui metode studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap literatur yang relevan dan kredibel dalam membantu peneliti memahami dan mengkaji masalah yang diteliti. Analisis deskriptif adalah metode analisis data dalam penelitian ini. Teknik deskriptif dapat dianggap sebagai proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan/melukiskan keadaan

subjek/objek penyelidikan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain).

## RESULTS AND DISCUSSION

Tujuan dari kegiatan komunikasi pembangunan adalah untuk mendukung inisiatif pembangunan. Salah satu tujuan dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan adalah untuk menaikkan pendapatan dan status sosial ekonomi yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi, yang memerlukan pembangunan sebagai tindakan nyata. format konsep dan kemampuan yang digunakan untuk keberhasilan. Kebijakan pembangunan IKN yang sarat akan pro dan kontra merupakan bukti tidak efektifnya komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Masrun et al., 2022).

Adanya isu mengenai pembangunan IKN yang tidak mengindahkan dan mempertimbangkan variable-variabel seperti ekosistem dan masyarakat serta hanya mengejar modernisasi tanpa adanya pertimbangan dampak jangka panjang sejarahnya dapat dilihat dan ditinjau dari perspektif etis pembangunan.

### 1. Konsep Pembangunan IKN

Akibat perluasan dan migrasi penduduk, khususnya, pembangunan dan pertumbuhan kota yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memengaruhi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan kota. Menyadari hal ini dalam prinsip pembangunannya, Pemerintah Indonesia mencanangkan secara matang mengenai konsepsi Ibu Kota Nusantara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ibu kota adalah tempat di mana kekuasaan politik suatu bangsa dipusatkan atau tempat bertemunya cabang-cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ibu kota negara biasanya dipandang sebagai representasi dari identitas bangsa penyusunnya. Ibukota negara merupakan bagian penting dalam menggambarkan identitas nasional karena berfungsi sebagai pusat kelompok pendukung, konflik, dan kohesi antara berbagai kelompok yang membentuk suatu negara atau bangsa. Ini juga berfungsi sebagai lokasi kekuatan suatu negara atau berfungsi untuk menggambarkan ruang lingkup kekuatan suatu negara. Ibukota negara juga merupakan pusat politik, memainkan

peran penting dalam diskusi tentang legitimasi kekuasaan.

Secara yuridis, pembangunan IKN dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Peraturan perundang-undangan tersebut mengemukakan IKN kelak nantinya akan membawa visi sebagai kota bertaraf internasional yang berperan sebagai tauladan sekaligus merupakan manifestasi dari penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Prinsip-prinsip pengembangan IKN menyatakan bahwa pengembangan IKN akan menggunakan pendekatan efisiensi sumber daya dan rendah karbon, serta konstruksi 100% ramah lingkungan untuk semua bangunan, baik komersial maupun residensial. Untuk mendorong realisasi prinsip-prinsip pengembangan IKN, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) telah membuat dan menerapkan sejumlah instrumen dan standar. Sejak tahun 2010, Sistem Sertifikasi Bangunan Hijau telah dibuat. Komponen utama dalam memerangi perubahan iklim adalah penggunaan bangunan hijau, yang merupakan struktur yang menggabungkan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam semua aspek desain, konstruksi, operasi, dan manajemennya.

Penggunaan material yang ramah lingkungan, serta sarana dan prasarana untuk konservasi sumber daya air pada bangunan gedung, merupakan salah satu persyaratan yang harus ada pada sebuah bangunan ramah lingkungan. Di Indonesia, pembuatan instrumen untuk menerapkan sertifikasi bangunan hijau didasarkan pada persyaratan tersebut. *Green Building Council Indonesia* (GBCI), sebuah Lembaga Sertifikasi Bangunan Hijau yang telah didaftarkan oleh KLHK, sekarang melakukan sertifikasi bangunan hijau. Dengan kata lain, di bawah pengawasan KLHK, GBCI menghasilkan alat sertifikasi yang lebih teknis yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Sertifikasi bangunan hijau juga dapat digunakan untuk merujuk pada Peraturan Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau No. 21 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut peraturan tersebut, bangunan hijau harus memenuhi kriteria ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh skema penilaian kinerja

Bangunan Gedung Hijau Kementerian PUPR (Ichwan et al., 2022).

Pembangunan Ibu Kota Negara dianggap dapat memperhatikan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dengan kelestarian alam dan lingkungan, khususnya dalam menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang merupakan potensi utama Pulau Kalimantan. Hutan Kota dapat menjadi model perencanaan kota yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Pemindahan dan pengembangan ibu kota negara yang baru diharapkan berdampak pada (1) peningkatan kinerja perekonomian, seperti tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, simpul-simpul baru pusat infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah, dan (2) peningkatan perbaikan fungsi administrasi pemerintahan dengan mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, bab ini akan fokus membahas aspek-aspek peningkatan fungsi administrasi pemerintahan (Saputra et al., 2021).

Adapun, proyek pemindahan ibu kota sejatinya telah banyak dilakukan oleh negara-negara lain di dunia, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Daftar Negara yang Pernah Melakukan Pemindahan Ibu Kota

| No | Negara     | Tahun | Pemindahan                 |
|----|------------|-------|----------------------------|
| 1  | Nigeria    | 1991  | Lagos ke Abuja             |
| 2  | Kazakhstan | 1997  | Aimaty ke Astana           |
| 3  | Myanmar    | 2005  | Yangon ke Naypyidaw        |
| 4  | Brazil     | 1960  | Rio de Janeiro ke Brasilia |

Pemindahan ibu kota melalui pembangunan ibu kota baru dapat menunjukkan efektivitas dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih baik. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari keberhasilan pembangunan bangsa setelah pemindahan ibu kota baru, seperti pembangunan jangka panjang suatu bangsa dengan kekuatan sosial yang kuat dan simbol-simbol nasional dan pengurangan ketegangan konflik sosial yang kadang-kadang muncul dalam kasus-kasus ketegangan kekuatan politik dan ekonomi di negara-negara studi kasus

## 2. Etis Lingkungan Pembangunan IKN

Sebagai proyek yang memiliki kepentingan strategis yang tinggi, beberapa fase penting akan diselesaikan, dimulai dengan pembentukan landasan hukum dan kelembagaan proyek dan diakhiri dengan pembangunan infrastruktur utama dan tambahannya. Fase penetapan agenda kebijakan ini hanya mendapat sedikit dukungan publik karena merupakan upaya yang cukup besar, baru, dan mahal dari sudut pandang sosiokultural, ekonomi, dan ekologi. Karena fenomena gelombang migrasi, baik permanen maupun sirkuler, termasuk ASN, aparat TNI/Polri, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengejar kemungkinan ekonomi, proyek ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dari sudut pandang sosiokultural. Potensi konflik sosial dapat muncul, misalnya, ketika masyarakat pendatang merasa "tersingkir" oleh masyarakat lokal dan ketika negara dan masyarakat baru gagal mengakui hak-hak masyarakat lokal untuk mempraktikkan adat istiadat mereka. Secara ekonomi, relokasi IKN ditunjukkan oleh studi Indef tidak mampu mendorong pertumbuhan PDB riil dan PNB. Studi yang menggunakan model keseimbangan umum ekonomi menunjukkan bahwa potensi perkembangan PDB di provinsi tujuan hanya 0,24%, dan pengaruh kebijakan ini terhadap pertumbuhan PDB sebenarnya dianggap tidak ada (0%) dalam jangka pendek. Efek lain dari relokasi IKN adalah mendorong penurunan output di hampir semua industri yang bergantung pada sumber daya alam (Fristikawati et al., 2022).

Namun demikian, permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan IKN yang umum disorot adalah isu lingkungan dan pelanggaran etika lingkungan. Etika adalah penilaian kritis tentang bagaimana orang harus hidup dan berperilaku dalam konteks khusus dan khusus. Studi etika, sering dikenal sebagai filsafat moral atau ilmu moral, adalah studi tentang moral benar dan salah serta perilaku yang tepat dalam pengaturan sehari-hari. Studi etika adalah refleksi kritis dan logis tentang prinsip-prinsip dan standar moral yang memandu dan membentuk sikap dan pola perilaku orang, baik secara individu maupun kolektif. Etika berusaha membantu orang dalam bertindak secara bebas dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan selalu merupakan hasil dari pilihan pribadi yang

bebas, aktor selalu siap untuk menerima tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan dimotivasi oleh faktor-faktor penting.

Sedangkan lingkungan disebut Ruang yang dihuni oleh entitas hidup dan tak hidup, seperti lapisan tanah dan udara yang merupakan rumah bagi organisme. Lingkungan terdiri dari semua elemen, termasuk manusia dan tindakan mereka, yang ada di daerah di mana orang tinggal dan yang berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Studi tentang bagaimana seharusnya manusia memposisikan diri dalam ekosistem atau dalam lingkungannya disebut sebagai ekologi terapan, yang merupakan penerapan dari banyak konsep dan ketentuan ekologi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut pengertian ini, fokus etika lingkungan adalah bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku terhadap lingkungan. Etika lingkungan adalah disiplin filsafat yang membahas hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta dan bagaimana seharusnya perilaku manusia terhadap lingkungan.

Etika lingkungan umumnya dipandang sebagai pemeriksaan kritis tentang apa yang harus dilakukan orang ketika dihadapkan dengan keputusan moral tentang tantangan lingkungan. Hal ini mencakup apa yang harus diputuskan oleh pemerintah dalam hal kebijakan ekonomi dan politiknya yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan, serta apa yang harus diputuskan oleh manusia ketika memenuhi persyaratan moral mereka yang berdampak pada lingkungan. Interaksi antara manusia dengan manusia lain yang berdampak pada alam serta antara manusia dengan makhluk hidup lain atau alam secara keseluruhan juga dibahas dalam etika lingkungan. Hal ini mencakup keputusan ekonomi dan politik yang mempengaruhi alam baik secara langsung maupun tidak langsung (Subhilhar, 2022).

Secara khusus, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur adalah tempat calon kawasan IKN berada. Lokasi IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur, sebuah wilayah Kalimantan yang secara strategis penting untuk melindungi keanekaragaman hayati (kehati). Pulau yang juga dikenal dengan sebutan Borneo ini dikenal sebagai "Paru-Paru Dunia" karena hutannya

yang kaya akan keanekaragaman hayati dan berperan penting dalam produksi oksigen dan penyerapan karbon .

Tujuan perencanaan tata ruang pulau Kalimantan adalah untuk melestarikan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan fungsi lindung dengan vegetasi hutan tropis basah yang mencakup setidaknya 45% dari luas pulau untuk mempertahankan statusnya sebagai "Paru-Paru Dunia" sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Kalimantan (Purnomo et al., 2021). Paru-paru Dunia adalah petak-petak tanaman tropis basah dalam rentang lahan yang luas yang berfungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global, menurut Perpres tersebut. Kebijakan tentang pulau-pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia menyerukan pelestarian ekosistem dengan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik, penciptaan koridor ekosistem antara kawasan konservasi, stabilisasi dan rehabilitasi kawasan lindung, dan pengaturan kegiatan budidaya yang mungkin mengganggu kawasan lindung (Muharram, 2020).

Berangkat dari konsep tersebut pemerintah berkewajiban untuk dapat membangun konsep yang sesuai dengan cita-cita awal dalam pengelolaan pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Isu sosial dan isu lingkungan yang dihadapi dalam pembangunan ikm apabila ditinjau dari sudut pandang komunikasi pembangunan dapat dipahami sebagai suatu hal yang menimbulkan adanya dilematis dan tanda tanya. Pemerintah dikatakan tidak tegas dan serius dalam konservasi wilayah pulau Kalimantan. Melalui adanya komunikasi yang dilakukan dengan berdasar pada pertimbangan pembangunan dalam etis pembangunan pemerintah dapat merancang adanya konsepsi dan persepsi masyarakat mengenai pembangunan IKN yang tetap mengindahkan prinsip konservasi wilayah pulau Kalimantan.

### **3. Komunikasi Pembangunan Pemerintah dalam Pembangunan IKN**

komunikasi adalah Ilmu pengetahuan multidisiplin, . Dalam banyak bidang kehidupan, komunikasi sangat penting. Salah satunya adalah yang terkait dengan pembangunan. Tentu saja, komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat yang lebih luas diperlukan selama

proses pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk mempromosikan pengetahuan tentang perlunya proses pembangunan, serta peran dan kontribusi berbagai pihak untuk menyukseskan rencana pembangunan.

Melihat definisi "komunikasi pembangunan," kita dapat melihat bahwa hal itu mengacu pada cabang penelitian yang terutama berkaitan dengan penggunaan teori dan konsep komunikasi dalam proses pembangunan. Peran dan tujuan komunikasi (kontak pertukaran pesan dua arah) antara semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, khususnya pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam komunikasi pembangunan. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan semuanya memerlukan komunikasi yang efektif. dalam hal komunikasi untuk pembangunan (Wicaksono, 2022).

Ungkapan "komunikasi sosial pembangunan" sudah sangat dikenal. Dimana perlu adanya keseimbangan antara faktor eksternal dan internal pembangunan. untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi pembangunan diperlakukan secara adil dan mengarah pada saling pengertian. Proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam rangka mengubah suatu pendapat, sikap, atau perilaku diteliti dalam ilmu komunikasi. Hasilnya, setidaknya diperlukan tiga unsur untuk pembangunan, yaitu komunikator pembangunan (pemerintah atau masyarakat), pesan pembangunan yang berisi gagasan atau strategi pembangunan, dan komunikan pembangunan (masyarakat luas yang menjadi sasaran pembangunan).

Secara umum, istilah "komunikasi pembangunan" mengacu pada peran dan tujuan komunikasi (sebagai kegiatan pertukaran pesan timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan, khususnya antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan penilaian pembangunan. Upaya, strategi, dan taktik yang digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan untuk masyarakat yang lebih luas, secara kolektif disebut sebagai komunikasi pembangunan (Ichwan et al., 2022).

Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang dituju memahami, menerima, dan ikut serta dalam mempraktekkan konsep-konsep yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan utama komunikasi pembangunan haruslah untuk menginformasikan dan menginspirasi orang lain, bukan untuk membesar-besarkan kebenaran atau mempromosikan diri sendiri. Tujuan komunikasi pembangunan adalah untuk menanamkan pengetahuan, menumbuhkan sikap mental, dan menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk bangsa yang sedang berkembang. Menurut Quebral, komunikasi pembangunan dapat didefinisikan secara pragmatis sebagai komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan agenda pembangunan suatu bangsa. 3 Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bukanlah hasil mobilisasi, melainkan kemauan dan kecerdasan. Masyarakat dianggap sebagai subjek dalam proses pembangunan, bukan semata-mata sebagai objek.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, ide-ide pembangunan harus dimulai dari sana. Partisipasi, sosialisasi, mobilisasi, kerja sama, dan tanggung jawab di antara kelompok-kelompok individu dalam perencanaan pembangunan adalah komponen utama dari model pengembangan kapasitas atau pengembangan diri dalam strategi komunikasi. Tujuan dari inisiatif pengembangan kapasitas adalah untuk mendidik, mendukung, dan memungkinkan masyarakat untuk menemukan, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas potensial mereka. Oleh karena itu, fokusnya ditempatkan pada komunikasi horizontal di antara komunitas atau aliran informasi dan pesan dari bawah ke atas. Bersama-sama, masyarakat harus memutuskan rencana aksi, menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. memilih saluran informasi dan komunikasi yang paling relevan untuk kebutuhan mereka. berikut ini adalah fungsi utama komunikasi dalam berbagai upaya pengembangan diri:

- 1) Menyebarluaskan pengetahuan teknis tentang tantangan dan peluang pembangunan, serta solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan daerah.
- 2) Berbagi informasi tentang keberhasilan kelompok-kelompok lokal dalam pengembangan diri, sehingga kelompok-kelompok lain dapat belajar dari kesalahan mereka dan terinspirasi untuk mencapai keberhasilan serupa.

Kegiatan komunikasi pembangunan sangat diuntungkan dari penggunaan jasa teknologi (komunikasi) dalam perubahan sosial. Saat ini, pertimbangan substansial diberikan untuk menggunakan dan menerapkan teknologi komunikasi dalam proyek-proyek pembangunan. Siaran televisi, VCR, komputer, komunikasi satelit, telepon, teleconference, dan audioconference adalah contoh-contoh teknologi komunikasi. Sementara itu, istilah "komunikasi dunia maya" dan "internet" umumnya digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk baru teknologi komunikasi. Dari sini, kita bisa mengidentifikasi email, milis, blog, publikasi online, dan lainnya.

Komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan IKN umumnya dilakukan melalui media-media seperti televisi dan media lainnya melalui portal pemberitaan.

Wacana pembangunan ikm dapat dengan mudah ditemui diberagam media. Pemerintah juga telah berkali-kali memaparkan bahwasanya konsep IKN akan berbasis pada pembangunan lingkungan dan forest city.

Forest city didefinisikan sebagai "kota yang didominasi oleh ruang terbuka hijau yang memiliki pemanfaatan ekosistem seperti hutan dan dengan strategi lanskap terpadu untuk mencapai keadaan yang bersebelahan dengan alam" secara lebih rinci sebagai konsep pengembangan ibu kota baru di kawasan IKN.

Karena dimaksudkan untuk membangun kehidupan yang dapat hidup berdampingan dengan lingkungan alam, maka pembangunan forest city ini akan sangat memperhatikan ekologi hutan secara utuh. IKN yang direncanakan sebagai kota metropolis hutan, merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap tantangan kehutanan dan lingkungan hidup yang sedang marak di dunia saat ini. Sebuah kota yang memiliki bangunan yang tertutup pepohonan dan vegetasi lainnya disebut sebagai "forest city." (Mau et al., 2018). Untuk mencapai tujuan dari konsep ini, pedoman tertentu yang telah dibuat selama pembangunan forest city harus diikuti.

Bahkan rumusan tentang prinsip-prinsip panduan forest city ini telah dibuat pada tahun 2019 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui gagasan forest city, KLHK telah mengembangkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan tujuan Indonesia untuk menjadi bangsa yang cerdas di masa depan. Keenam prinsip

panduan tersebut adalah sebagai berikut: 1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) hubungan dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang terpenuhi; 5) pembangunan yang diatur; dan 6) partisipasi masyarakat lokal dalam penciptaan forest city.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan bergantung pada keberlanjutan kehidupan hutan, karena hutan merupakan sumber kehidupan yang dapat menawarkan keuntungan yang berdampak signifikan bagi kehidupan manusia. Semua masalah lingkungan yang perlu dijaga dan diperhitungkan tercakup dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat dilihat sebagai janji bahwa IKN mendukung status Kalimantan sebagai paru-paru dunia karena kontribusinya terhadap pengembangan kota hijau. Karena hubungannya yang erat dengan alam, Kalimantan menjadi contoh konkret bagaimana pembangunan dapat menumbuhkan hubungan antara manusia dan lingkungan. misalnya, pengembangan atraksi pariwisata di dalam zona hijau. Selain itu, dapat menangani pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara saat ini dengan menggunakan konsep forest city ini.

## CONCLUSION

Sejatinya komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan ikm telah dilaksanakan secara baik. Namun demikian, pemerintah sebagai komunikator tidak memperjelas wacana yang telah dibangun dalam pembangunan IKN ini. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis dan merasa adanya pembangunan IKN ini sebagai wacana yang menonjolkan modernisasi tanpa mengindahkan etika pembangunan dalam isu lingkungan. Padahal, pembangunan IKN dilaksanakan menurut konsep kota hutan yang akan menjadikan struktur IKN sebagai kota yang mampu untuk menampung pemerintahan Indonesia melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Dibutuhkan adanya komunikasi pembangunan yang lebih efektif dengan mengandalkan adanya pemanfaatan teknologi mengenai implementasi serta perwujudan dari konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang pemerintah canangkan di Kalimantan.

## REFERENCES

- Fajri, C., Mawadati, S., & Yudhana, A. (2018). Komunikasi Sosial Pemerintah Kulon Progo Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Terkait Pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport. *Komunikator*, 10(2). <https://doi.org/10.18196/jkm.101012>
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739–749.
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8193>
- Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 212–221.
- Ichwan, M., Reskiani, U., & Makmur, A. (2022). Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Jurnal Legislatif*, 5(2), 115–125. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/21100>
- Masrun, F., Karo, S. B., & Wirasati, W. (2022). Ideologi Media Pada Pemberitaan Nusantara Sebagai Ibu Kota Baru Indonesia. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(1), 42–50.
- Mau, X., Zhai, C., & Lu, Y. (2018). Research on Key Points of Forest City Construction——A Case Study in Gaoan City of Jiangxi. *HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES*, 57(6), 70.
- Muharram, S. (2020). Kebijakan “Revolusi Hijau” Paman Birin dalam menjaga kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 49–64.
- Purnomo, E. P., Zahra, A. A., Malawani, A. D., & Anand, P. (2021). The kalimantan forest fires: An actor analysis based on supreme court documents in Indonesia. *Sustainability*, 13(4), 2342.
- Ratnaningtyas, H., Nurbaeti, N., Asmaniaty, F., & Bilqis, L. D. R. (2022). Berwisata ke Jakarta dengan Kemacetannya. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 4(2), 58–66.
- Saputra, S. D., Gabriel J, T., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara) Strategy Analysis Relocation Of The Capital Cit. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7, 192.
- Sari, G. K. (2022). INTEGRASI PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BARU DAN DAERAH PENYANGGANYA. *STANDAR: Better Standard Better Living*, 1(2), 27–32.
- Servaes, J. (2008). Communication for development and social change. In *Communication for Development and Social Change* (Issue January 2008). <https://doi.org/10.4135/9788132108474>
- Subhilhar. (2022). Etika Pembangunan: Kajian Alternatif dalam Studi Pembangunan. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v1i1.8622>
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfa. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046%0Ahttps://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=853411>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syhadat, R. M., Putra, P. T., & Pratiwi, M. D. (2021). Ruang Terbuka Hijau Dan Permasalahan Kesehatan Perkotaan Studi Kasus Di Provinsi DKI Jakarta. *Arsitektur Lansekap*, 3(2), 179–188.
- Wicaksono, M. A. (2022). *Upaya Berkelanjutan Sesuai Peran, Hak, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan: Studi Kasus Hutan Kalimantan*.
- Zuhdi, S., Djafar, H., Shahab, Y. Z., Sopandi, A., Attas, S. G., Iskandar, M., & Saputra, Y. A. (2018). *Penelusuran Sejarah Peradaban Jakarta*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jakarta.